



# RENCANA STRATEGIS

ප්‍රකාශ සැලැස්ම

2020—2024

෧෭෦෦-෧෭෦෪

BALAI BAHASA PROVINSI BALI

කර්ම මාස ප්‍රවර්ධන කමිටු



## KATA PENGANTAR

Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali disusun berdasarkan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta hasil evaluasi pelaksanaan pada periode sebelumnya. Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan dalam pembangunan pendidikan.

Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020—2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Lembaga yang bertugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan Bahasa dan sastra di Provinsi Bali, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Denpasar, Agustus 2021



**Toha Machsum, M.Ag.**

Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali

## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	6
1.2 Permasalahan dan Potensi.....	14
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	16
2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Balai Bahasa Provinsi Bali .....	18
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran .....	19
2.3 Tata Nilai .....	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemdikbud.....	22
3.2 Kerangka Regulasi.....	24
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	25
3.4 Reformasi Birokrasi.....	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	31
4.1 Target Kinerja.....	31
4.2 Kerangka Pendanaan.....	32
BAB V PENUTUP .....	34
LAMPIRAN	
Lampiran I Matriks Renstra 2020—2024	
Lampiran II Defenisi Operasional Indikator	

# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan keseluruhan pembangunan bagi seluruh entitas kelembagaan di Indonesia. Sistem tersebut menghasilkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka panjang akan ditempuh dalam kurun waktu 20 tahun mulai 2005—2024, melalui empat tahapan. Tahap akhir (2020—2024) dengan tema penguatan daya saing regional dan internasional, merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya. Fokus utama tahap ini terletak pada peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dengan karakteristik: sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Agenda tersebut selaras pula dengan janji presiden terpilih pada Pemilihan Umum 2019 yang memfokuskan agenda pemerintahan periode 2020—2024 pada pembangunan SDM sebagai lanjutan dari periode pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada agenda pembangunan infrastruktur.

Pembangunan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Fokus pembangunan dalam bidang ini mengacu pada Renstra Badan Bahasa sehingga diarahkan pada tiga titik strategis, yaitu (1) perencanaan bahasa dan implementasinya, (2) pembangunan budaya literasi, dan (3) pemajuan sastra. Tiga titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Titik strategis pertama berkaitan dengan perencanaan bahasa (*language planning*), yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan bahasa bertalian dengan *siapa* merencanakan, *apa*, untuk *siapa*, dan *bagaimana*. Ada empat sasaran dalam perencanaan bahasa, yaitu (1) perencanaan status, (2) perencanaan korpus, (3) perencanaan pemerolehan, dan (4) perencanaan prestise. Perencanaan status berkaitan dengan pilihan sadar untuk menetapkan status Bahasa misalnya sebagai bahasa resmi negara dan sarana yang memudahhi interaksi antara negara dan warganya. Perencanaan korpus mengacu pada kegiatan pemodernan bahasa, seperti pembaruan ejaan, pemerdayaan istilah,

standardisasi, kodifikasi, dan sebagainya. Sementara itu, perencanaan pemerolehan berkaitan dengan upaya seseorang dalam memperoleh kemampuan berbahasa, terutama melalui jalur pengajaran bahasa. Terakhir, perencanaan prestise berkaitan dengan upaya peningkatan citra sebuah bahasa dan penerimaan masyarakat terhadap produk yang dikeluarkan oleh para pelaku perencanaan bahasa.

Titik strategis kedua berkaitan dengan pembangunan budaya literasi yang dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melancarkan jalan Indonesia menjadi negara maju. Setakat ini literasi tidak lagi hanya dipahami sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi sebagai kecakapan hidup yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Keberliterasian dalam konteks ini mencakup segenap upaya yang dilakukan untuk membekali warga bangsa dengan kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Warga yang literat dan kehidupan yang berkualitas merupakan ciri negara maju. Hanya dengan meningkatkan literasi warganya, Indonesia akan mampu bersanding dengan negara-negara maju.

Titik strategis ketiga berkaitan dengan pemajuan sastra untuk memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Sastra juga berperan sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan, peneguh jati diri bangsa, dan solidaritas kemanusiaan. Dengan adanya pembangunan berkemajuan dalam bidang kesastraan, diharapkan meningkat pula posisi sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia. Ketiga titik strategis dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan di atas perlu diejawantahkan dalam dokumen rencana strategis yang memuat arah kebijakan dan perangkat pendukung yang diperlukan, baik dukungan anggaran maupun regulasi. Dokumen ini harus memuat langkah konkret yang ditempuh selama kurun waktu tertentu sehingga tujuan pembangunan tercapai melalui program yang tepat sasaran dan anggaran yang efisien. Untuk kepentingan itulah Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020—2024 ini disusun.

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2020—2024 disusun berdasarkan paradigma pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai berikut.

#### 1. Bidang Kebahasaan

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi bahasa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bahasa memiliki peran

yang sangat strategis dalam pembangunan SDM karena bahasa melekat erat pada diri penuturnya. Bahasa digunakan untuk berpikir, berimajinasi, berkomunikasi, merasa, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Oleh sebab itu, mustahil pembangunan manusia dilaksanakan dengan mengabaikan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dengan paradigma berikut ini.

*a. Bahasa sebagai Sarana Berpikir*

Bahasa merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memahami dirinya dan objek di lingkungan sekitarnya. Melalui bahasa pula manusia berimajinasi dan memahami hal-hal abstrak yang ada dalam benaknya. Selain itu, melalui bahasa manusia merencanakan dan menyimpulkan ihwal tindakan yang perlu dilakukan untuk merespon fenomena yang dialaminya: tindakan yang tepat berasal dari simpulan yang tepat; simpulan yang tepat berasal dari proses berpikir yang tepat. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjalankan fungsinya sebagai petunjuk jati diri keindonesiaan.

*b. Bahasa sebagai Sarana Berkomunikasi*

Selain sebagai sarana berpikir, bahasa juga merupakan sarana berkomunikasi antarmanusia. Melalui bahasa, manusia menyampaikan pesan berisi gagasan dan perasaan kepada kawan tuturnya sehingga tercipta kesamaan pemahaman atas sesuatu. Komunikasi yang baik terjadi ketika pesan yang disampaikan dipahami secara utuh oleh penerima pesan tersebut. Penyampaian pesan melalui bahasa dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulis. Pesan yang disampaikan secara lisan, apalagi sambil bersemuka, cenderung mudah dipahami karena didukung adanya intonasi, tempo, dan ekspresi penyampai pesan, tetapi berbeda halnya dengan pesan tertulis. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan pemahaman, perlu kaidah penulisan yang menjadi kesepakatan bersama. Berdasarkan perspektif itu, bahasa Indonesia merupakan sarana berkomunikasi antarwarga negara Indonesia.

*c. Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan*

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sangat penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan bagi warga negara Indonesia. Dengan pengetahuan tersebut manusia Indonesia menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing. Daya

ungkap yang dimiliki bahasa Indonesia harus mampu mewadahi gagasan ilmiah yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Daya ungkap tersebut terekam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus istilah, dan kamus lain.

*d. Bahasa sebagai Pembentuk Karakter Bangsa*

Apa yang dimiliki pada masa sekarang dan masa lalu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan sesuatu yang baru dan yang belum diketahui. Sebagai makhluk sosial manusia melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya. Hal penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendongeng adalah salah satu kebiasaan baik yang merupakan tradisi pengajaran tertua dalam dunia pendidikan. Dongeng juga menjadi penyebab tumbuhnya bahasa dalam evolusi peradaban manusia. Untuk itu, mendongeng yang digunakan sebagai media pembelajaran dapat membangun pendidikan karakter.

*e. Bahasa sebagai Alat Strategi dan Diplomasi*

Penggunaan bahasa internasional pada forum-forum internasional menjadi tanda bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat diplomasi. Potensi kebahasaan di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk diplomasi (*soft diplomacy*), baik di dalam maupun di luar negeri. Ke-binekatunggalikaan bahasa di Indonesia dapat dijadikan contoh bahwa melalui bahasa sebuah bangsa dapat bersatu.

*f. Bahasa sebagai Kebanggaan dan Citra Bangsa*

Kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat akan mendukung citra bangsa karena bahasa memiliki fungsi antara lain: (1) bahasa sebagai simbol budaya dan nilai kebangsaan, (2) bahasa sebagai simbol negara dan bangsa (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi etika dan estetika bangsa (4) bahasa sebagai eksplorasi keindahan alam dan geografis bangsa, dan (5) bahasa sebagai bentuk kecintaan hubungan antarsuku bangsa.

*g. Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa*

Bahasa persatuan dan bahasa negara itu sekaligus mencerminkan status atau kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia antara lain berfungsi sebagai (a) lambang kebanggaan dan identitas nasional, (b) alat

pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya serta bahasanya, dan (c) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

#### *h. Bahasa sebagai Sarana Ekspresi*

Bahasa sebagai sarana ekspresi dalam mengaktualkan kehendak, ide, dan pendapat dapat diuraikan, seperti: (1) bahasa sebagai ekspresi keunggulan, keanekaragaman seni dan budaya dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, (2) bahasa sebagai ekspresi keunggulan kelenturan kerukunan artikulasi nilai agama dan norma masyarakat, (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi kekayaan sastra, (4) bahasa sebagai ekspresi kemuliaan suku dan bangsa, dan (5) bahasa sebagai ekspresi kecintaan terhadap rasa kepemilikan terhadap bangsa Indonesia.

#### *i. Bahasa sebagai Basis Industri Kreatif*

Saat ini industri kreatif berbasis kebahasaan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Bahasa apa pun, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, menjadi sumber yang sangat kaya untuk dimanfaatkan oleh para pelaku industri olah kata. Sumber kekayaan tersebut tersimpan dalam bentuk idiom, peribahasa, pepatah, semboyan, slogan, kata mutiara, silogisme, imbauan, humor, satire, dan sebagainya. Pelaku industri kreatif memanfaatkan hal tersebut sebagai basis usahanya, misalnya dalam bentuk permainan kata-kata yang ditampilkan di kaus, topi, tas, dan sebagainya. Selain itu, kreativitas dalam pengolahan kata juga berperan penting dalam dunia periklanan, penerjemahan, penulisan konten kreatif pada skenario film, animasi, gim daring, dan sebagainya.

#### *j. Bahasa sebagai Penghela Pembangunan Manusia Indonesia*

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia. Dengan menyadari sepenuhnya atribut yang melekat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam poin a—i di atas, dapat dipahami peran strategis bahasa Indonesia sebagai penghela pembangunan manusia Indonesia. Tidak mungkin tercipta manusia Indonesia seutuhnya (berjati diri dan berdaya saing) jika mengabaikan pembangunan bidang kebahasaan.

## 2. Paradigma Pembangunan Bidang Kesastraan

Pembangunan bidang kesastraan dilaksanakan dalam kerangka paradigma berikut ini.

- 1) Sastra sebagai peneguh jati diri.
- 2) Sastra sebagai penumbuh solidaritas kemanusiaan.
- 3) Sastra sebagai sarana pengungkapan wawasan keindonesiaan dan daerah.



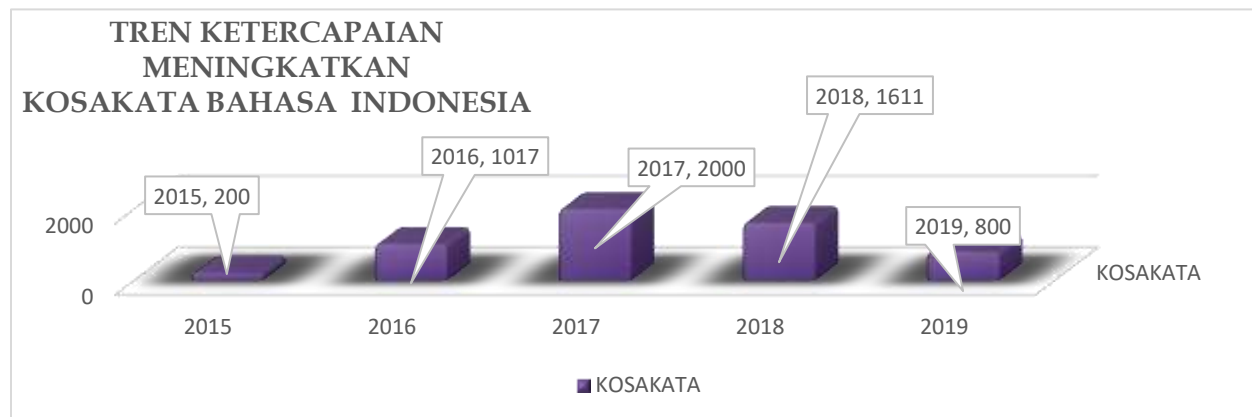
- 4) Sastra sebagai sarana aktualisasi nilai kehidupan.
- 5) Sastra sebagai penumbuh sikap dan penghalusan perasaan dan budi pekerti.
- 6) Sastra sebagai sarana pengungkapan budaya dan kearifan lokal.

### 1.1 Kondisi Umum

Dalam periode Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali Tahun 2015—2019, Balai Bahasa Provinsi Bali telah meningkatkan kosakata bahasa Indonesia, meningkatkan jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi, meningkatkan mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan, meningkatkan mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, meningkatkan jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia, meningkatkan jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, meningkatkan jumlah ruang publik yang terkendali, meningkatkan mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, dan menyelenggarakan layanan dukungan manajemen teknis di lingkungan Badan Bahasa.

#### A. Meningkatkan Kosakata Bahasa Indonesia

Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah, Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan aktivitas identifikasi data kosakata dan penyusunan data kosakata bahasa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan dan perlindungan bahasa Bali dan menambah kosakata bahasa Indonesia. Berikut tren ketercapaian meningkatkan kosakata bahasa Indonesia.



Berdasarkan tren ketercapaian di atas Balai Bahasa Provinsi Bali sejak tahun 2015—2019 telah melaksanakan pengumpulan data kosakata Bahasa daerah sebanyak 5.628 kosakata (100%) sesuai dengan target Renstra sebelumnya. Pengumpulan kosakata tersebut, digunakan

untuk penambahan kosakata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V dan Kamus Bahasa Daerah Bali—Indonesia. Kedua kamus tersebut, diluncurkan dalam bentuk cetak dan daring.

Adapun hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi, terutama dalam bidang leksikografi dan teknologi.
2. Terdapat beberapa kosakata yang tidak ada definisinya.
3. Kurangnya sumber penunjang, seperti: buku, jurnal, dan majalah penelitian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah menyiapkan beberapa antisipasi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal leksikografi dan teknologi melalui keikutsertaan seminar, simposium, dan lokakarya berkaitan dengan peristilahan, perkamus, dan korpus bahasa agar mengetahui perkembangan mutakhir untuk menjaga kualitas hasil dan pekerjaan pengembangan kosakata.
2. Melibatkan peran serta pakar/praktisi bidang ilmu dan masyarakat sebagai upaya mendefinisikan kosakata dan informasi.
3. Menyediakan sumber penunjang di perpustakaan.

#### *B. Meningkatkan jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi*

Provinsi Bali hanya memiliki 1 (satu) bahasa daerah dengan beragam dialek. Keanekaragaman dialek dalam bahasa itu merupakan cerminan keanekaragaman masyarakat di Bali. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Balai Bahasa Provinsi Bali telah melaksanakan upaya pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah. Berikut tren ketercapaian meningkatkan jumlah bahasa dan sastra yang terlindungi.



Berdasarkan tren ketercapaian di atas Balai Bahasa Provinsi Bali sejak tahun 2015—2019 secara akumulatif telah melakukan upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah sebanyak 5 bahasa dan 5 sastra (100%). Ketercapaian tersebut melalui 3 empat program yang dilakukan, yaitu (1) Pemetaan Bahasa dan sastra, (2) Kajian Vitalitas Bahasa dan Sastra, dan (3) Konservasi Bahasa dan Sastra. Faktor pendorong ketercapaian ini disebabkan oleh koordinasi serta kolaborasi yang baik antar Balai Bahasa Provinsi Bali dan para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut.

1. Jumlah penutur asli yang sangat terbatas dan memiliki kemampuan komunikasi dengan bahasa Indonesia yang terbatas.
2. Penyusunan peta bahasa berkas isoglos yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali sudah menyiapkan strategi mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan jasa penerjemah lokal dan menambahkan pendamping lapangan dalam tim pengambilan data.
2. Menyesuaikan jadwal pengambilan data dan mengondisikan pakar penyusun peta sehingga peta dapat segera terwujud.

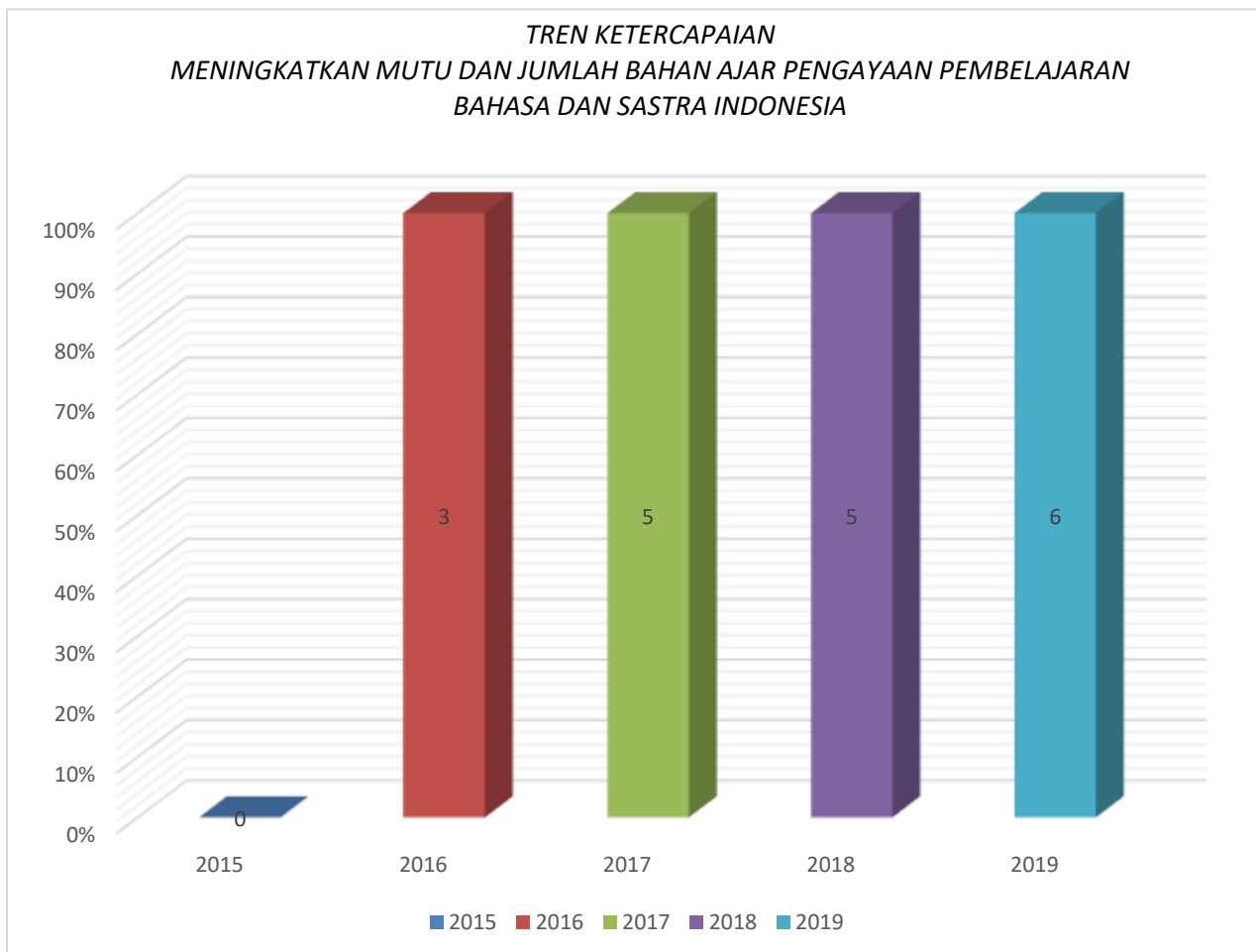
*C. Meningkatkan mutu dan jumlah penelitian kebahasaan dan kesastraan*



Berdasarkan gambar di atas, jumlah dokumen penelitian bahasa dan sastra oleh Balai Bahasa Provinsi Bali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berjumlah 91 dokumen sehingga capaian kinerja sudah mencapai 100% dari target tahun Renstra, yaitu 91 dokumen. Ketercapaian tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh program/kegiatan yang terkait kajian kebijakan pengembangan dan perlindungan.

Proses pencapaian target tersebut tidak terlepas dari hambatan/kendala yang dihadapi. Salah satu kendalanya adalah pada tahap pengumpulan data, yaitu sulitnya mendapatkan data dukung. Adapun langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan persiapan awal yang lebih matang dan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan sehingga data untuk kajian/penelitian dapat dengan mudah diperoleh.

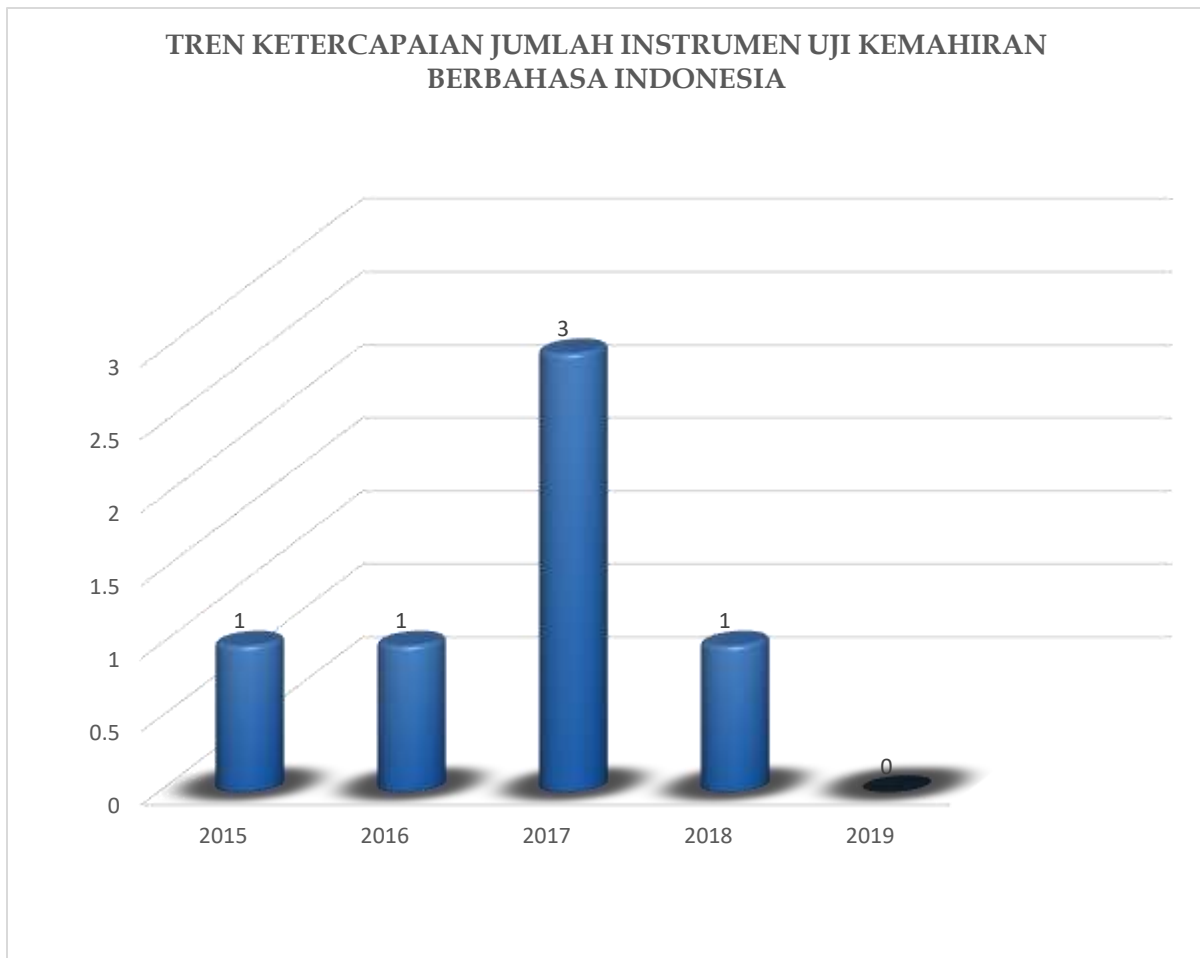
*D. Meningkatkan mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia meningkatkan mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia*



Berdasarkan tren ketercapaian di atas, pencapaian Meningkatkan Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia diukur melalui IKK Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan literasi. Bahan bacaan tersebut ditujukan untuk satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Secara akumulatif capaian IKK Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan dan Kesastraan adalah sebesar 100% atau 19 judul buku yang telah ditetapkan melalui kegiatan sayembara penulisan bahan bacaan.

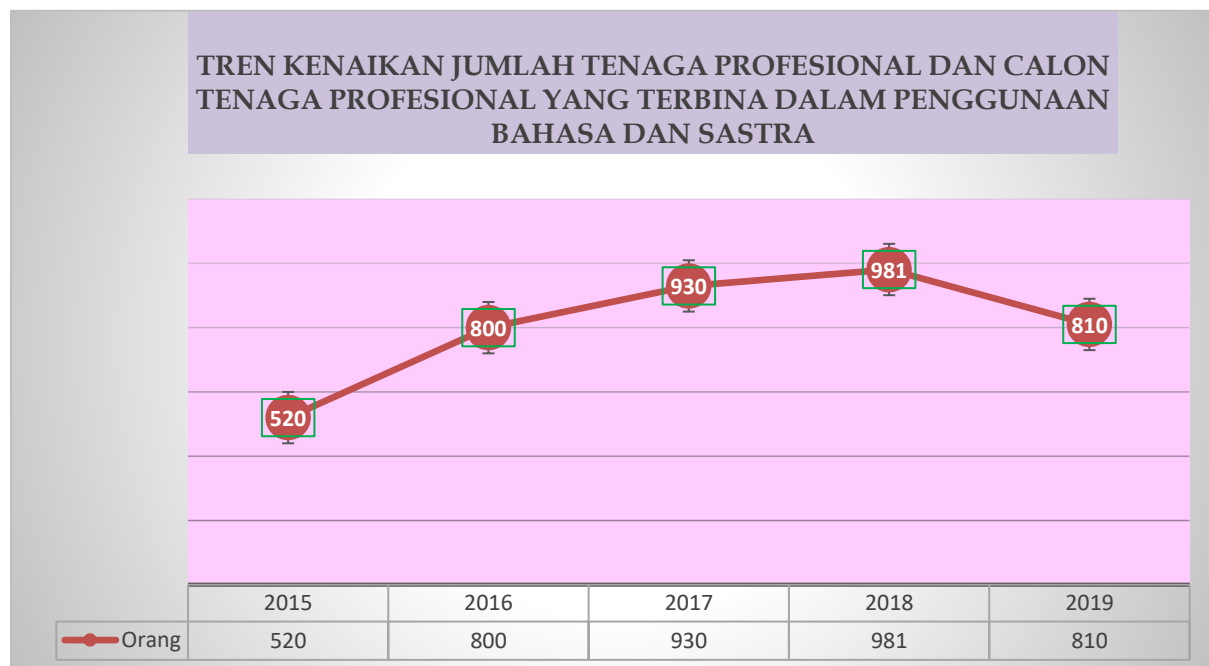
Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan jumlah bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra adalah masih sedikitnya penulis yang ikut serta dalam kegiatan sayembara ini. Beberapa langkah antisipasi untuk mencapai target pada tahun berikutnya, yaitu (1) memberikan rentang waktu yang lebih panjang dari pengumuman sampai dengan pengumpulan naskah sehingga lebih banyak waktu bagi penulis untuk memasukkan/mengikuti sayembara ini (2) melakukan sosialisasi ke daerah sehingga dapat diketahui oleh publik, dan (3) menyederhanakan kriteria yang terkandung dalam sayembara.

*E. Meningkatkan jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia*



Berdasarkan gambar di atas, meningkatkan jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia merupakan aktivitas penyusunan bahan dan soal uji kemahiran berbahasa Indonesia yang nantinya dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Khusus untuk tahun 2019 aktivitas Penyusunan Bahan dan Soal Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia tidak dilaksanakan karena penyusunan instrumen uji kemahiran berbahasa Indonesia hanya dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa.

F. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra



Ketercapaian Meningkatkan Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina diukur melalui IKK Jumlah Tenaga Profesional Dan Calon Tenaga Profesional Yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui kegiatan, yaitu (1) Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional, (2) Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional, (3) Identifikasi Jejaring BIPA, dan (4) Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Orang Asing. Secara akumulatif capaian IKK IKK Jumlah Tenaga Profesional Dan Calon Tenaga Profesional Yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra adalah sebesar 100% atau 4.041 orang. Adapun yang menjadi sasaran dalam ketercapaian IKK ini untuk dibina kemahiran berbahasa Indonesia, yaitu pelajar, pengajar, ASN, aparat penegak hukum, dan WNA.

G. Meningkatkan jumlah ruang publik yang terkendali penggunaan bahasanya



Ketercapaian meningkatkan jumlah ruang publik yang terkendali *penggunaan bahasanya* sesuai gambar di atas karena adanya dukungan dari aktivitas/kegiatan, yaitu melakukan pembinaan penggunaan bahasa dalam bentuk pengawasan dan pengendalian penggunaan bahasa serta penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia dengan menasar lembaga badan publik dan swasta.

Proses pencapaian target tersebut tidak terlepas dari hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Salah satu kendalanya adalah belum ada tindaklanjut terkait nota kesepakatan hasil dari kegiatan sehingga penggunaan bahasa yang tertib di lembaga pemerintah dan swasta belum terwujud. Harapan ke depan, ada tindaklanjut nota kesepakatan sehingga butir-butir yang tertuang di dalamnya dapat dilaksanakan.

H. Meningkatkan mutu dan jumlah bahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan

Dalam upaya mendukung ketercapaian meningkatkan mutu dan jumlah bahan pengembangan



strategi dan diplomasi kebahasaan sesuai gambar, Balai Bahasa Provinsi Bali melakukan aktivitas penyusunan bahan pendukung pengajaran BIPA. Aktivitas penyusunan bahan pendukung BIPA adalah kegiatan untuk menghasilkan buku-buku yang menunjang pengajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing (BIPA). Buku-buku pendukung dapat berupa buku cerita atau lembar kerja siswa. Setelah memiliki buku penunjang berupa buku cerita mula sampai lanjut. Buku penunjang dibuat untuk menunjang kegiatan pengajaran sehingga proses pengajaran menjadi terarah dan terstruktur.

## **1.2. Permasalahan dan Potensi**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada periode 2015—2019, dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Bali untuk periode 2020—2024 sebagai berikut.

- 1) Terbatasnya kosakata bahasa Bali yang dapat diusulkan ke dalam KBBI karena Provinsi Bali hanya memiliki satu bahasa daerah;
- 2) Rendahnya budaya literasi keluarga, sekolah, dan masyarakat;
- 3) Kurangnya sikap positif berbahasa Bali dan bahasa Indonesia generasi muda di Bali;
- 4) Tidak teraksesnya layanan kebahasaan oleh masyarakat;
- 5) Kurangnya partisipasi publik dalam pemecahan masalah kebahasaan;
- 6) Kurangnya penerapan kaidah kebahasaan dalam pemakaian bahasa di ruang publik;
- 7) Kurang terkendalinya penggunaan bahasa asing di ruang publik;
- 8) Masih sedikitnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan bahasa di daerah;
- 9) Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah.

Agar pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan berdampak luas bagi masyarakat, perlu dioptimalkan potensi-potensi berikut ini.

### **1. Potensi jumlah penutur bahasa Indonesia**

Hampir semua penduduk di Provinsi Bali adalah penutur bahasa Indonesia. Artinya, potensi penutur bahasa Indonesia di Bali mencapai empat juta jiwa. Bagi sebagian penduduk di Bali, terutama penutur muda, bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama. Sebagian lain menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua.



## 2. Potensi Bahasa Daerah

Bali sebagai daerah pariwisata dianugerahi kekayaan budaya yang sangat berlimpah. Kekayaan budaya daerah Bali yang menjadi kebanggaan negeri diantaranya berasal dari seni lukis, seni ukir, seni musik, seni tari, karya sastra (cerita-cerita) daerah, permainan tradisional, bahasa daerah, adat istiadat, kepribadian masyarakatnya dan lain sebagainya. Peranan bahasa daerah sangat penting sebagai media komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Melalui bahasa dapat diketahui karakter suatu bangsa. Melalui bahasa warisan budaya dapat dilestarikan pada generasi penerus. Melalui bahasa dapat digali beragam potensi budaya daerah yang masih tersimpan. Melalui bahasa terjalin interaksi yang akrab dan kekeluargaan didalam masyarakat. Melalui bahasa menunjukkan penghargaan dan kebanggaan yang mendalam terhadap budaya bangsa sendiri. Oleh karenanya, bahasa daerah perlu diwariskan kepada generasi muda secara turun temurun untuk melestarikan budaya daerah yang berpotensi menjadi budaya nasional.

## 3. Potensi Pegiat Literasi

Jumlah menurut *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi* yang diterbitkan kemdikbud, Provinsi Bali menempati peringkat ke-5. Melihat capaian tersebut, sangat dimungkinkan pegiat literasi di Bali juga banyak. Melihat potensi besar ini, Balai Bahasa Provinsi Bali perlu melakukan upaya meningkatkan dan mendorong komunitas serta pegiat literasi agar tingkat literasi masyarakat terus meningkat.

## 4. Potensi UKBI

UKBI adalah instrumen tes utama kemahiran berbahasa Indonesia di dalam negeri dan luar negeri. UKBI telah dikembangkan seturut ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik dalam desain, materi, proses, maupun teknologi layanan pengujiannya. Balai Bahasa Provinsi Bali telah memiliki SDM dan sarana yang memadai untuk melayani masyarakat dalam pengujian UKBI .

## 5. Potensi pembina bahasa

Jumlah pembina bahasa Indonesia yang meliputi penyuluh, widyaiswara, guru, dan dosen bahasa Indonesia belum terdata dan terbina untuk menjadi bagian ekosistem dalam upaya meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak mungkin melakukan pembinaan bahasa Indonesia.

## 6. Potensi kelembagaan

Balai Bahasa Provinsi Bali memiliki jumlah tenaga peneliti dan sumber daya manusia yang memadai, tingginya komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas, terjalinnya kerja sama yang

baik antarlembaga terkait, dan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut merupakan kekuatan untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa dan sastra di Provinsi Bali.

## ***BAB II***

# ***TUJUAN DAN SASARAN***

Visi Balai Bahasa Provinsi Bali mengikuti visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden,

***Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.***

Berdasarkan rumusan visi tersebut, dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai pada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.*

### **Misi**

Untuk mencapai visi, Balai Bahasa Provinsi Bali mengikuti misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 5 tahun ke depan yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut

***Terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat yang tinggi, penguatan praktik diplomasi kebahasaan yang maju, dan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berdasarkan politik dan perencanaan bahasa baru.***

Indikator keberhasilan:

- 1) Terciptanya ekosistem riset dan rekayasa kebahasaan dasar dan terapan yang kondusif untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat dijadikan rujukan dalam teori dan praktek kebahasaan.
- 2) Terciptanya budaya literasi masyarakat yang maju dengan kompetensi yang tinggi sejalan dengan perkembangan teknologi digital.
- 3) Menguatnya kerja sama institutional dan profesional para pemangku kepentingan pengembangan dan pembinaan bahasa dalam konteks pemanfaatan kepakaran kebahasaan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat.
- 4) Menguatnya peran bahasa Indonesia dalam praktik diplomasi kebahasaan di luar negeri.
- 5) Terpeliharanya praktik-praktik bahasa dan sastra daerah yang dinamis oleh komunitas penutur bahasa sebagai wujud perlindungan kearifan lokal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali akan terus mendukung beberapa langkah awal BPP Bahasa yang telah menyusun acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2020—2024 yang terangkum dalam beberapa produk acuan sebagai berikut.

- 1) Tersusunnya dokumen Politik dan Perencanaan Bahasa baru sebagai pedoman pengembangan dan pembinaan bahasa menuju Indonesia maju.
- 2) Dihasilkannya dokumen tentang peta jalan baru riset kebahasaan dan kebijakan pendidikan literasi sebagai landasan untuk penyelenggaraan riset kebahasaan dan praktik pendidikan literasi di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- 3) Tersusunnya bahan ajar literasi dan model-model pembelajarannya yang dapat digunakan oleh masyarakat yang didukung teknologi digital inovatif.
- 4) Terbentuknya dan beroperasinya forum mitra literasi sebagai wadah pembinaan penggerak literasi di masyarakat untuk mengembangkan pendidikan literasi yang didukung oleh teknologi digital.
- 5) Terbentuknya dan beroperasinya forum komunikasi penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) di dalam negeri dan tersedianya pusat-pusat pembelajaran BIPA di perwakilan strategis Indonesia di luar negeri.

Dengan pertimbangan tersebut, berikut ini misi BPP Bahasa

- 1) Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.
- 2) Mewujudkan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital.
- 3) Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju.
- 4) Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat.
- 5) Mewujudkan layanan profesional kebahasaan.

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif.

## **2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Balai Bahasa Provinsi Bali**

Tujuan lembaga merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan ditetapkannya tujuan, diharapkan perencanaan program lembaga dapat disusun secara tepat dan terarah dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Perumusan tujuan juga akan memungkinkan lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja lembaga.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Tujuan (IKT). Penetapan IKT berpatokan kepada Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penetapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Bali. IKT tersebut terdiri atas lima (5) hal sebagai berikut.

1. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji.
2. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik.
3. Nilai dimensi budaya literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan).
4. Indeks daya hidup bahasa daerah.
5. Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas.

Adapun target Indikator Kinerja Tujuan di akhir renstra tahun 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		
		Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya kemahiran penutur Bahasa Indonesia	Persentase penutur Bahasa Indonesia mahir teruji	Persentase	50%
		Persentase wilayah yang menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik	Persentase	65%
2	Meningkatnya budaya literasi	Nilai Dimesni Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Nilai	71,04
3	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	Indeks daya hidup bahasa daerah sebesar 0,59	Indeks	0,59
4	Terwujudnya tata Kelola dilingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB	Predikat	BB

## 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Balai Bahasa Provinsi Bali, diperlukan sejumlah sasaran yang akan dicapai pada periode Renstra 2020—2024. Sasaran itu berkaitan dengan sasaran kegiatan (SK) yang termuat di dalam renstra. Karena Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali mengacu kepada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sasaran kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali juga sejalan dengan sasaran kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sasaran-sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama, yaitu meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia adalah jumlah kosakata bahasa Indonesia.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua, yaitu terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga, yaitu meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina adalah jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat, yaitu terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam adalah jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima, yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91.

Berdasarkan penahapan pencapaian sasaran strategis 2020—2024, sasaran kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2020—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Bali**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	5,628	1000	1200	1200	1200	1200
Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	91	1	1	1	1	1
Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	35	20	110	110	110	110
Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	4,041	1,592	608	700	800	800
Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	orang	74	80	80	80	80	80
	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	orang	144	150	150	150	150	150
	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	sastra	5	1	1	1	1	1
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB

lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	93	95	95	95	95
--	---	-------	----	----	----	----	----	----

### 2.3 Tata Nilai

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik. Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai Balai Bahasa Provinsi Bali merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Tata nilai yang dimaksud adalah **amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan**.

**Amanah** atau dapat dipercaya mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berpegang teguh pada tugas dan tanggung jawab yang dibebankan, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada tugas dan tanggung jawab tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok (keluarga dan teman).

**Profesional** mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa berupaya menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang dimilikinya untuk menghasilkan kinerja terbaik.

**Visioner** atau **berwawasan ke depan** mengandung arti bahwa dalam bekerja senantiasa mempertimbangkan dan mengaitkan apa yang dikerjakan dengan perkiraan situasi yang akan terjadi di masa datang sehingga karyanya benar-benar relevan dan sejalan dengan situasi yang mungkin terjadi di masa datang, dengan tetap mengacu pada ilmu pengetahuan dan informasi yang lengkap, utuh, dan mutakhir.

**Demokratis, berkeadilan, dan inklusif** mengandung arti bahwa dalam bekerja bersikap terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata.



# ***BAB III***

## ***ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI***

Pembangunan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Fokus pembangunan dalam bidang ini mengacu pada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020—2024, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Bali. Renstra menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang diarahkan pada tiga titik strategis, yaitu (1) perencanaan bahasa dan implementasinya, (2) pembangunan budaya literasi, dan (3) pemajuan sastra. Tiga titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan dipertajam ke dalam Renstra Balai Bahasa Provinsi Bali agar tidak keliru dan dapat optimal dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga keluaran-keluaran yang menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kemdikbud**

Arah kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Bali mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berasal dari arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Peningkatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya seperti pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
2. Pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
3. Pembinaan bahasa dan sastra.

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan Kemendikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berdiri pada dua bidang: bidang pendidikan dan kebudayaan. Arah kebijakan pada bidang pendidikan adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Strategi yang digunakan yaitu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri melalui berbagai aktivitas.

Pada bidang kebudayaan, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas. Strategi yang dilaksanakan adalah dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2025.

Arah kebijakan Balai Bahasa Provinsi Bali mendukung perwujudan arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait pelaksanaan tugas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Daerah. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut.

1. Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.
2. Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina.
3. Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia.
4. Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia.
5. Terlindunginya Bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah.

6. Meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

### 3.2. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa kerangka rancangan regulasi didasarkan pada rancangan regulasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Balai Bahasa Provinsi Bali pada periode waktu tahun 2020—2024, Adapun kerangka/kebutuhan regulasi Balai Bahasa Provinsi Bali meliputi:

**Tabel 3.2 Kerangka Regulasi**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan
1	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA
2	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA
3	Peraturan tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar program BIPA	Diperlukannya regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar BIPA sebagai upaya penjaminan mutu pengajaran BIPA.
4	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Kemasyarakatan	Penjaminan mutu juru bahasa kemasyarakatan, termasuk juru bahasa hukum (pengadilan dan kepolisian)
5	Peraturan tentang pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia	Pentingnya peraturan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang selama ini belum tersedia
6	Peraturan tentang pedoman umum pembentukan istilah	Perlunya kaidah yang baku dalam pembentukan istilah
7	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya
8	Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
9	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUPU, dan pedoman lainnya
10	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Penambahan tarif nol dalam PNBP UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran pelajar
11	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
12	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa Indonesia
13	Peraturan tentang Standar Kompetensi Ahli Bahasa	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Ahli Bahasa yang bisa digunakan dalam persidangan, penyusunan Undang-undang dan membina penggunaan bahasa Indonesia melalui penyuluhan dan penyuntingan, serta kebutuhan ahli bahasa di kepolisian
14	Peraturan tentang Pengembangan dan Pelindungan Sastra	1. Melindungi hak cipta Paten sastra. 2. Perluanya Kebijakan nasional pengembangan dan pelindungan sastra 3. Menjadikan sastra tuan di negeri sendiri, menangkal serbuan sastra asing

		<p>ke dalam negeri.</p> <p>4. Meningkatkan fungsi dan peran sastra pada masyarakat secara nasional dan internasional</p> <p>5. Perlunya pengaturan pemerayaan khazanah sastra, pengembangan laras sastra, pemantapan dan pembakuan sistem sastra, penerjemahan, penyaduran, pengadaptasian, pengalihwahan, pengutipan, dan pengambilan sebagai bahan pembelajaran sastra.</p>
--	--	---

### 3.3 Kerangka kelembagaan

Balai Bahasa Provinsi Bali harus didukung dengan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Balai Bahasa Provinsi Bali secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis Kemendikbud, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.



Balai Bahasa Provinsi Bali dipimpin oleh Kepala Balai Bahasa yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Lembaga ini memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020. Berdasarkan struktur organisasi di atas, dalam melaksanakan tugas Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali mengambil kebijakan pelaksanaan sebagai berikut.

- 1) Pengkajian bahasa dan sastra;
- 2) Pemetaan bahasa dan sastra;
- 3) Pemasarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasarakatan bahasa dan sastra;
- 5) Pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- 6) Pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- 7) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Bahasa;

Secara kelembagaan, Balai Bahasa Provinsi Bali terdiri atas Kepala Balai, Tenaga Administrasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali didukung oleh 42 orang pegawai yang terdiri atas:

**Tabel 3.3 Pemangku Jabatan Balai Bahasa Provinsi Bali**

<b>Pemangku Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
Kepala	1 orang
Kasubbag Tata Usaha	1 orang
Fungsional Teknis Peneliti	11 orang
Fungsional Teknis Penerjemah	2 orang
Fungsional Umum	27 orang
PPNPN	11 orang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Bali perlu bekerja sama dengan lembaga lain, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam kerja sama tersebut, Balai Bahasa Provinsi Bali berperan sebagai fasilitator yang mengemban amanat melaksanakan kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan.

Ditinjau dari sisi geografis, jangkauan wilayah kerja Balai Bahasa Provinsi Bali hanya di wilayah Provinsi Bali. Provinsi Bali memiliki luas wilayah 5.636 km<sup>2</sup> dengan populasi sebanyak 4.3 juta jiwa. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Denpasar. Provinsi Bali terdiri atas sembilan kota/kabupaten, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Jembrana.

### 3.4. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan salah satu dari 3 UPT di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan untuk meraih predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai Lembaga yang telah diusulkan untuk meraih predikat ZI-WBK dan mengemban amanat dalam menangani kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Bali, maka Balai Bahasa Provinsi Bali berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan inovasi untuk meningkatkan kepuasan *stakeholder* dan masyarakat.

Balai Bahasa Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mengimplementasikan pembangunan ZI-WBK. dengan membangun 6 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

**Tabel 3.4 Area Perubahan**

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1	Manajemen Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dalam membangun WBK.</li> <li>Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang diusulkan sebagai WBK.</li> <li>Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perandatangan komitmen bersama untuk mewujudkan ZI-WBK.</li> <li>Sosialisasi penerapan budaya kerja melalui kegiatan peningkatan mutu SDM dan pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan penerapan budaya dan penguatan.</li> <li>Pemberian <i>Reward</i> bagi pegawai disiplin.</li> <li>Pemberian Punishment sesuai dengan PP 53 Tahun 2010.</li> <li>Menyosialisasikan dan menerapkan motto pelayanan “CINTA”, yaitu Cepat, Inovatif, Netral, Transparan, Akuntabel.</li> <li>Monitoring pelaksanaan program 6 pengungkit</li> </ol>
2	Penguatan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Reviu peta proses bisnis.</li> <li>Reviu POS.</li> <li>Penerapan POS.</li> </ol>

		2. Meningkatnya efisiensi dan	4. Evaluasi POS. 5. Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan (E-Office). 6. Pemanfaatan IT dalam.
3	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai. 2. Pola Mutasi Internal. 3. Pengembangan Pegawai 4. Penetapan Kinerja Individu 5. Penegakan Aturan Disiplin 6. Sistem Informasi Kepegawaian	1. Program Mutasi Internal Pegawai. 2. Pemutahiran Data Formasi 3. <i>Assessment</i> Pegawai 4. Penanaman nilai integritas melalui lomba- lomba kegiatan peningkatan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan. 6. Kegiatan peningkatan kompetensi publikasi melalui kursus. 7. Menghimpun Rencana, Realisasi SKP 8. Dokumen Pemanggilan Pegawai Yang Melanggar Disiplin. 9. Optimalisasi SIMPEG. 10. Monitoring Aplikasi SAPK. 11. Penyusunan Anggaran dan Program Kerja
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya kinerja SDM Balai Bahasa Provinsi Bali. 2. Meningkatnya akuntabilitas Balai Bahasa Provinsi Bali.	1. Pelibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra. 2. Pelibatan pimpinan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja/PK. 3. Pelibatan pimpinan dalam Pemantauan secara berkala. 4. Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, PK, RKT). 5. Dokumen perencanaan berorientasi hasil. 6. Dokumen perencanaan memuat indikator kinerja. 7. Dokumen perencanaan telah SMART. 8. LAKIP disusun tepat waktu. 9. LAKIP memuat informasi kinerja. 10. Peningkatan kompetensi SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja

5.	Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.</li> <li>2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara.</li> <li>3. Meningkatnya status opini BPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian gratifikasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi gratifikasi.</li> <li>b. Implementasi gratifikasi.</li> <li>c. Evaluasi dan tindak lanjut Gratifikasi.</li> </ol> </li> <li>2. Implementasi SPI dan SPIP <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan lingkungan pengendalian</li> <li>b. Penyusunan Peta resiko</li> <li>c. Sosialisai SPI SPIP</li> <li>d. Pembentukan tim SPI dan SPIP</li> <li>e. Evaluasi dan tindak lanjut SPI SPIP</li> </ol> </li> <li>3. Pengaduan masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Impelementasi Dumas</li> <li>b. Penanganan Dumas</li> <li>c. Evaluasi dan tindak lanjut Dumas</li> </ol> </li> <li>4. Implementasi Whistle Blowing System (WBS) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Internalisasi WBS</li> <li>b. Penerapan WBS</li> <li>c. Evaluasi dan tindak lanjut WBS</li> </ol> </li> <li>5. Penanganan Benturan Kepentingan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi dan Internalisasi benturan kepentingan</li> <li>b. Implementasi benturan kepentingan</li> </ol> </li> <li>6. Evaluasi dan tindak lanjut benturan Kepentingan.</li> </ol>
----	-------------------------	---	--



6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya mutu layanan</li> <li>2. Meningkatnya inovasi layanan Balai Bahasa Provinsi Bali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan.</li> <li>2. Pelatihan penguatan pelayanan bagi ASN dan PPNPN.</li> <li>3. Evaluasi Pelayanan bagi pegawai PNS dan PPNPN.</li> <li>4. Sistem <i>Reward and Punishment</i>.</li> <li>5. Layanan ULT melalui laman.</li> <li>6. Pengelolaan Data di Kotak Pelayanan Pengaduan yang dikelola secara rutin</li> <li>7. Pelayanan melalui Unit Layanan Terpadu /ULT.</li> <li>8. Mengembangkan budaya pelayanan prima.</li> <li>9. Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik.</li> <li>10. Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan</li> <li>11. Menciptakan inovasi layanan, yaitu (1) Penyediaan permohonan layanan berbasis daring (formulir elektronik) dan android yang jelas dan mudah diakses, (2) Penyediaan Pojok Baca, (3) Rumah BIPA (Bahasa Indonesia Penutur Asing), (4) Penyediaan sarana dan prasarana bagi kaum difabel, dan (5) Layanan pengaduan yang jelas dan mudah diakses, (6) Penyediaan Kamus Bali—Indonesia berbasis android, dan (7) Pendampingan Edukasi Komunitas Literasi</li> </ol>
----	--------------------------------	--	--

Dengan merujuk pada fokus pembangunan menuju ZI WBK, dari ke enam komponen penilaian tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto:

**“MELAYANI DENGAN CINTA”**  
***Cepat, Inovatif, Netral, Transparan, Akuntabel***

# **BAB IV**

## **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1. Target Kinerja**

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Sasaran. Balai Bahasa Provinsi Bali menetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), mengacu pada target unit utama, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terangkum dalam Renstra Kemendikbud 2020—2024. Keberhasilan Sasaran Kegiatan tersebut ditentukan oleh tingkat ketercapaian IKK. Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Bali tahun 2020—2024 memuat 9 IKK yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Target Kinerja**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	KONDISI AWAL	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia	1.1	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	Kosakata	5,628	1000	1200	1200	1200	1200
2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	dokumen	91	1	1	1	1	1
3	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	3.1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	35	20	110	110	110	110
4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	orang	4,041	1,592	608	700	800	800

5	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	5.1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	orang	74	80	80	80	80	80
		5.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	orang	144	150	150	150	150	150
		5.3	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	5	1	1	1	1	1
6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		6.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	93	95	95	95	95

Dalam hal jumlah target yang mengalami peningkatan target disebabkan karena adanya kegiatan dengan pola baru. Dengan pola baru tersebut, diharapkan sasaran yang selama ini ada, tidak mengalami kejenuhan. Selain itu juga mengarah pada daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh, sasaran baru juga akan dikaji terlebih dahulu. Dalam hal jumlah target yang mengalami penurunan, disebabkan karena sasaran yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya, tidak akan diambil lagi sebagai obyek sasaran kegiatan.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Kemendikbud dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud dibagi menjadi dua periode yakni:

1. Periode tahun 2020; dan
2. Periode tahun 2021—2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga.

Kebutuhan pendanaan periode pertama tahun 2020 sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut.

**TABEL 4.2.1 Kerangka Pendanaan 2020**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	2020
5289	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	<b>8.403</b>
002	Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina	206
005	Bahasa Terlindungi	75
006	Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia	262
008	Sastra Terlindungi	144
010	Kamus dan Pengembangan Istilah	124
011	Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra	209
012	Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah	305
013	Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra	302
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	340
970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	442
994	Layanan Perkantoran	5.991

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh Kementerian/Lembaga, tertuang pada tabel sebagai berikut.

**TABEL 4.2.2 Kerangka Pendanaan 2021—2024**

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Anggaran			
		2021	2022	2023	2024
<b>023.13.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>6.545</b>	<b>6.741</b>	<b>6.943</b>	<b>7.151</b>
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	6.545	6.741	6.943	7.151
<b>023.13DH</b>	<b>Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan</b>	<b>2.603</b>	<b>1.852</b>	<b>1.926</b>	<b>2.003</b>

# ***BAB V***

## ***PENUTUP***

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan bahasa dan sastra mendapatkan tempat yang strategis. Kondisi tersebut perlu didukung dengan implementasi ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Rencana strategis Balai Bahasa Provinsi Bali ini disusun guna memandu arah pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut.

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah mengevaluasi pencapaian Renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kehadiran Renstra ini menjadi acuan bagi Balai Bahasa Provinsi Bali.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN I MATRIKS RENSTRA 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Target Kinerja					Anggaran					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SK1</b>	<b>Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia</b>												
IKK1	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	Kosakata	1000	1200	1200	1200	1200	124,383	664,936	698,182	733,091	769,745	769,745
<b>SK2</b>	<b>Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>												
IKK1	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	Dokumen	1	1	1	1	1	209,218	77,423	81,294	85,358	89,626	89,626
<b>SK3</b>	<b>Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>												
IKK1	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	Lembaga	20	110	110	110	110	206,011	571,010	599,560	629,538	661,015	661,015
<b>SK4</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>												
IKK1	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	Orang	1,592	608	700	800	800	870,333	522,500	548,625	576,056	604,859	604,859
<b>SK5</b>	<b>Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Puhah</b>												
IKK1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puhah	Orang	74	80	80	80	80	75,755	-	79,542	83,519	87,695	87,695
IKK2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puhah	Orang	144	144	150	150	150	119,820	-	125,811	132,101	138,707	138,707
IKK3	Jumlah Produk Kesastraan	Sastra	1	1	1	1	1	24,853	141,666	148,749	156,186	163,996	163,996
<b>SK6</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>												
IKK1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	41,501.00	40,708	42,743	44,880	47,124	47,124
IKK2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	93	95	95	95	95	6,731,926.00	6,427,413	6,748,783	7,086,222	7,440,533	7,440,533

## Lampiran II Definisi Operasional Indikator

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
SK	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia			
IKK	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	Jumlah kata beserta maknanya yang ada dan dipakai dalam komunikasi berbahasa Indonesia ragam formal maupun informal	Penjumlahan entri KBBI, kamus bidang ilmu, dan entri dalam kompilasi kamus	1. KBBI Daring ( <a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/">https://kbbi.kemdikbud.go.id/</a> ), 2. Glosarium bidang ilmu ( <a href="http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/">http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/</a> ), dan 3. Aplikasi kompilasi kamus ( <a href="https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus/">https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus/</a> ), dan 4. Aplikasi Kamus Bali--Indonesia ( <a href="http://www.kamusbahasaprovinsibali.id/">http://www.kamusbahasaprovinsibali.id/</a> )
SK	Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia			
IKK	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	Hasil dari penelitian bahasa dan sastra yang dirangkum dan disarikan menjadi rekomendasi kepada pimpinan guna menjadi bahan dalam pengambilan keputusan	Angka dasar 91dokumen diperoleh berdasarkan dokumen kebijakan yang dimiliki Balai Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2019.  Pada tahun 2020, terdapat 1 dokumen kebijakan yang diperoleh dari akumulasi penelitian. Target tahun 2021 s.d. 2024 sebanyak 5 dokumen.	Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali 2019
SK	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik			
IKK	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	Jumlah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan bahasanya, terutama untuk papan nama lembaga, papan petunjuk, dan sebagainya.	Angka dasar sebanyak 35 diperoleh dari lembaga pemerintah dan swasta	Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali 2019
SK	Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina			



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKK	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional ter	Jumlah tenaga ahli khusus dan calon tenaga ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa dan sastranya melalui pembelajaran dan pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.	Angka dasar sebanyak 4.041 orang diperoleh berdasarkan jumlah peserta yang dibina pada tahun 2019, antara lain melalui penyuluhan, pelatihan, dan sebagainya. Kenaikan tiap tahun berdasarkan target yang dirancang Balai Bahasa Provinsi Bali.	Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Bali 2019
SK	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah			
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	<p>1. Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10–19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah.</p> <p>2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup bahasa daerah, perlindungan terhadap bahasa diprioritaskan pada bahasa yang kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.</p>	<p>1. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (&lt;20) dan yang terancam (&lt;40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41–0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.</p> <p>2. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.</p>	<p>1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id).</p> <p>2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: regbahasasastra.kemdikbud.go.id).</p>
IKK	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	<p>1. Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10–19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah.</p> <p>2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup sastra daerah, perlindungan terhadap sastra berbahasa daerah diprioritaskan pada sastra lisan yang berstatus kritis dan terancam punah. Oleh karena itu, sasaran kegiatan perlindungan bahasa ditargetkan agar bahasa dan sastra yang berada dalam kondisi kritis dan terancam punah itu meningkat statusnya menjadi berstatus (minimal) mengalami kemunduran.</p>	<p>1. Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks bahasa yang kritis (&lt;20) dan yang terancam (&lt;40) meningkat menjadi bahasa berstatus "mengalami kemunduran" (0,41–0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59.</p> <p>2. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut "Tunas Bahasa Ibu". Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.</p>	<p>1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah (sumber data daring: petabahasa.kemdikbud.go.id, regbahasasastra.kemdikbud.go.id, labbineka.kemdikbud.go.id).</p> <p>2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra daerah (sumber data daring: regbahasasastra.kemdikbud.go.id).</p>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Definisi Operasional	Metode Penghitungan	Sumber Data
IKK	Jumlah produk kesastraan terkembangkan	Produk sastra terkembangkan adalah produk dari hasil upaya untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi dan kedudukan sastra sebagai kekayaan budaya dan bagian dari sastra dunia melalui penelitian, peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia; kodifikasi sastra; penyusunan bahan ajar; penerjemahan; pengalihwanaan; dan publikasi hasil pengembangan sastra	jumlah penjumlahan hasil kritik sastra, alih wahana, entri/artikel kamus dan ensiklopedia sastra, serta acuan kesastraan.	Hasil kegiatan pengembangan sastra di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Bali.
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			
IKK	Rata-rata Predikat Sakip Satker minimal BB	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal CC berarti cukup (memadai), akuntabilitas kinerja cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.	Angka dasar predikat BB berdasarkan rata-rata predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Bali.	Dokumen SAKIP dari Biro Keuangan, Kemendikbud
IKK	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal	Capaian kinerja berdasarkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi (target dan anggaran)	Pembandingan target dan anggaran dalam dokumen perencanaan dengan	1. Aplikasi SMART DJA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220

Telepon: (021) 4896558, 4894564; Faksimile: (021) 4750407

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (*E-mail*): badan.bahasa@kemdikbud.go.id

Nomor : 3144 /I/PR/2020

15 Juli 2020

Lampiran : Satu Lembar

Hal : Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan  
pada Perjanjian Kinerja Satker di Lingkungan BPP Bahasa

Yth.

1. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan
  2. Kepala Pusat Pembinaan
  3. Kepala Balai/Kantor Bahasa
- di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dengan hormat,


Kami beri tahukan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 dan DIPA revisi satuan kerja tahun anggaran 2020 yang menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan pemetaan sasaran, indikator, dan output kegiatan yang digunakan untuk menyusun Perjanjian Kinerja satuan kerja tahun 2020, terlampir.

Perlu kami informasikan bahwa BPP Bahasa merencanakan mengajukan revisi Renstra 2020—2024 mengingat terbitnya surat edaran bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517M.PPN/D/PP04.03.05/2020 serta arahan Kepala Badan tentang pembentukan Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP) Kebahasaan dan Kesastraan.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan,  
Sekretaris Badan,



**Ovi Soviaty Rivay**  
NIP 196703121993032002

Tembusan:  
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220  
Telepon: (021) 4896558, 4894564; Faksimile: (021) 4750407

Laman: [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id); Pos-el (*E-mail*): [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)

**Lampiran I**

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
<b>2021</b>	<b>Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>	
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>	
	IKK	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
	IKK	Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan
	IKK	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan
	IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia</b>	
	IKK	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan</b>	
	IKK	Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara Kebahasaan
	IKK	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)
	IKK	Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan</b>	
<b>2022</b>	<b>Pebinaan Bahasa dan Sastra</b>	
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>	
	IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
<b>SK</b>	<b>Tersedianya Buku Pengayaan Untuk Mendukung Literasi Membaca</b>	
	IKK	Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan
	IKK	Jumlah Buku Pengayaan Literasi
		Jumlah Buku Pengayaan yang Digunakan Dalam Pendidikan untuk Meningkatkan Literasi Membaca
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>	
	IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220

Telepon: (021) 4896558, 4894564; Faksimile: (021) 4750407

Laman: [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id); Pos-el (*E-mail*): [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
<b>5289</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah</b>		
<b>SK</b>	<b>Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah</b>		
	IKK	Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat Dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis Dan Terancam Punah	
	IKK	Jumlah Penutur Muda Yang Terlibat Dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis Dan Terancam Punah	
	IKK	Jumlah Produk Kesastraan Berkembang	

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan</b>		
<b>2020</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Tatakelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>		
	IKK	Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	
	IKK	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	
	IKK	Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220  
Telepon: (021) 4896558, 4894564; Faksimile: (021) 4750407

Laman: [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id); Pos-el (*E-mail*): [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)

**Lampiran II**

**Output Kegiatan [2021] Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2020 Berdasarkan DIPA Revisi Tahun Anggaran 2020**

<b>Kode</b>	<b>Output</b>
2021.003	Pedoman dan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan
2021.004	Kamus dan Pengembangan Istilah
2021.005	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Penelitian
2021.007	Lembaga Kebahasaan Terfasilitasi
2021.008	Sastra Berkembang
2021.009	Bahasa Terlindungi
2021.010	Sastra Terlindungi
2021.011	Bahan Ajar Kemahiran Berbahasa
2021.012	Bahan Pengayaan Laboratorium Bahasa dan Sastra
2021.013	Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri
2021.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal

**Output Kegiatan [2022] Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2020 Berdasarkan DIPA Revisi Tahun Anggaran 2020**

<b>Kode</b>	<b>Output</b>
2022.003	Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina
2022.004	Badan Publik Terbina Penggunaan Bahasa
2022.005	Gerakan Literasi Nasional (GLN)
2022.007	Naskah Terjemahan
2022.008	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Bahasa dan Sastra melalui Penelitian
2022.009	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
2022.010	Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra
2022.011	Pemelajar Bahasa Asing
2022.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker
2022.994	Layanan Perkantoran

**Output Kegiatan [5289] Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah Tahun 2020 Berdasarkan DIPA Revisi Tahun Anggaran 2020**

<b>Kode</b>	<b>Output</b>
5289.002	Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina
5289.005	Bahasa Terlindungi
5289.006	Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia
5289.008	Sastra Terlindungi
5289.010	Kamus dan Pengembangan Istilah
5289.011	Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra
5289.012	Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah
5289.013	Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra
5289.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
5289.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker
5289.994	Layanan Perkantoran

**Output Kegiatan [2020] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Tahun 2020 Berdasarkan DIPA Revisi Tahun Anggaran 2020**

<b>Kode</b>	<b>Output</b>
2020.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
2020.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
2020.994	Layanan Perkantoran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220

Telepon: (021) 4896558, 4894564; Faksimile: (021) 4750407

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (*E-mail*): badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**Lampiran II**

**Pemetaan Sasaran, Indikator, dan Output Kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra**

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan/Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Output Kegiatan</b>
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	[2021.002] Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa
<b>IKK</b>	Jumlah Acuan Kebahasaan dan Kesastraan	2021.003 Pedoman dan Acuan Kebahasaan dan Kesastraan
<b>SK</b>	<b>Tersedianya Bahan Pengembangan Bahasa dan Sastra</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Bahan Ajar Kebahasaan	[2021.011] Bahan Ajar Kemahiran Berbahasa
<b>IKK</b>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	[2021.005] Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra melalui Penelitian
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia	[2021.004] Kamus dan Pengembangan Istilah
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Partisipan Aktif dalam Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Lembaga Terfasilitasi secara Kebahasaan	[2021.007] Lembaga Kebahasaan Terfasilitasi
<b>IKK</b>	Jumlah Pengajar Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)	[2021.013] Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Luar Negeri
<b>IKK</b>	Jumlah Bahan Pengayaan Laboratorium Kebahasaan	[2021.012] Bahan Pengayaan Laboratorium Bahasa dan Sastra
<b>SK</b>	<b>Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Puna</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Puna	[2021.009] Bahasa Terlindungi
<b>IKK</b>	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puna	[2021.010] Sastra Terlindungi
<b>IKK</b>	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	[2021.008] Sastra Terkembangkan
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>	
<b>IKK</b>	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	[2021.951] Layanan Sarana dan Prasarana Internal [2021.970] Layanan Dukungan
<b>IKK</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Manajemen Satker [2021.994] Layanan Perkantoran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220

Telepon: (021) 4896558, 4894564; Faksimile: (021) 4750407

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (E-mail): badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**Lampiran II**

**Pemetaan Sasaran, Indikator, dan Output Kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra**

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan/Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Output Kegiatan</b>
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	[2022.003] Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina [2022.004] Badan Publik Terbina Penggunaan Bahasa
<b>SK</b>	<b>Tersedianya Buku Pengayaan untuk Mendukung Literasi Membaca</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Buku Bermutu yang Diterjemahkan	[2022.007] Naskah Terjemahan 2022.008 Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Bahasa dan Sastra melalui Penelitian
<b>IKK</b>	Jumlah buku pengayaan literasi	[2022.005] Gerakan Literasi Nasional (GLN)
<b>IKK</b>	Jumlah buku pengayaan yang digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan literasi membaca	[2022.005] Gerakan Literasi Nasional (GLN)
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>	
<b>IKK</b>	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	[2022.001] Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia [2022.005] Gerakan Literasi Nasional (GLN) [2022.009] Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia [2022.010] Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra [2022.011] Pemelajar Bahasa Asing
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>	
<b>IKK</b>	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	[2022.951] Layanan Sarana dan Prasarana Internal
<b>IKK</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	[2022.970] Layanan Dukungan Manajemen Satker [2022.994] Layanan Perkantoran





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta 13220  
Telepon: (021) 4896558, 4894564; Faksimile: (021) 4750407

Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (E-mail): badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**Pemetaan Sasaran, Indikator, dan Output Kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Balai/Kantor Bahasa**

Kode	Kegiatan/Sasara/Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Output
<b>5289</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah</b>		
<b>SK</b>	<b>Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah</b>		
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam	5289.005	Bahasa Terlindungi
IKK	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	5289.005	Bahasa Terlindungi
IKK	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	5289.008	Sastra Terlindungi
<b>2022</b>	<b>Pembinaan Bahasa dan Sastra</b>		
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>		
IKK	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	5289.002	Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>		
IKK	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	5289.006	Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia
		5289.012	Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah
		5289.013	Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra
<b>2021</b>	<b>Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia</b>		
IKK	Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	5289.010	Kamus dan Pengembangan Istilah
<b>SK</b>	<b>Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>		
IKK	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	5289.011	Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra
<b>2020</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra</b>		
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Tatakelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>		
<b>IKK</b>	Predikat SAKIP Satker Minimal BB	5289.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
<b>IKK</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	5289.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		5289.994	Layanan Perkantoran

**Pemetaan Sasaran, Indikator, dan Output Kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Kode	Kegiatan/Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Output Kegiatan
<b>SK</b>	<b>Meningkatnya Tatakelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>	
<b>IKK</b>	Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	2020.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal
<b>IKK</b>	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	2020.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker
<b>IKK</b>	Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	2020.994 Layanan Perkantoran

**UTAMAKAN  
BAHASA  
INDONESIA**

**PELIHARA  
BAHASA  
DAERAH**

**KUASAI  
BAHASA  
ASING**

